



Direktorat SMK

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Tahun 2024

LOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

PANDUAN

Praktik Kerja Lapangan Sebagai Mata Pelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

EDISI REVISI TAHUN 2024



Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun 2024

PANDUAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN SEBAGAI MATA PELAJARAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

✓ PENGARAH

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kiki Yuliati

✓ PENANGGUNG JAWAB

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Wardani Sugiyanto

✓ PENELAAH

Eru Achmad Sutaman	(Direktorat SMK)
Jahani	(Direktorat SMK)
Harun Al Rosyid	(Direktorat SMK)

✓ PENULIS

Noris Rahmatullah	(Direktorat SMK)
Agricynthia Pratiwi Dharma	(Direktorat SMK)
Dinda Aramitha Wahyu Safitri	(Direktorat SMK)
Ikhsan Kurnia	(Direktorat SMK)

✓ KONTRIBUTOR

Sri Kurniati Pooroe	(Praktisi Pendidikan)
Sugiarta	(Praktisi Pendidikan)
Yogi Anggraena	(Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Taufiq Damarjati	(Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Eskawati M. B.	(Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Nur Rofika Ayu Shinta Amalia	(Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Tejarukmi Mutiara	(Praktisi Pendidikan)
Ummul Karimah	(Praktisi Pendidikan)
Leli Alhapip	(Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Erik	(Universitas Negeri Jakarta)
Fauziah Maryani	(Direktorat SMK)
Ifraz Farhan	(Direktorat SMK)
Nazarudin	(Sekretariat Direktorat Jenderal GTK)
Asyarudin	(Sekretariat Direktorat Jenderal GTK)
Darmawan Sunarja	(SMK Metland Bogor)
I Komang Purwata	(SMKN 1 Ubud)

✓ ILUSTRATOR, DESAIN DAN TATA LETAK

Irawan Dwi Putra	(Direktorat SMK)
------------------	------------------

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terbitnya Panduan Praktik Kerja Lapangan Sebagai Mata Pelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Panduan ini disusun dalam rangka memberikan inspirasi dalam penyusunan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kurikulum Merdeka.

Pendidikan di dalam Kurikulum Merdeka berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan untuk menjadikan peserta didik menjadi pelajar yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan berkarakter yang baik demi terwujudnya tujuan pendidikan. Dalam Kurikulum Merdeka, PKL menjadi mata pelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik SMK/MAK, oleh sebab itu panduan ini menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam penyusunan maupun pelaksanaan PKL.

“Panduan Praktik Kerja Lapangan Sebagai Mata Pelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka” merupakan dokumen yang berisi prinsip, implementasi PKL dalam Kurikulum Merdeka, tata cara pelaksanaan PKL, dan tata cara evaluasi program PKL. Dalam panduan ini dijelaskan tentang penyusunan program PKL, kegiatan pengganti PKL, serta cara menghitung jam pelajaran bagi guru mata pelajaran PKL yang diharapkan membantu satuan pendidikan.

“Panduan Praktik Kerja Lapangan Sebagai Mata Pelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka” bersifat dinamis dan akan disesuaikan di kemudian hari berdasarkan perkembangan dan situasi.

Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, penelaah, dan kontributor yang telah bekerja dengan sepenuh hati untuk menyiapkan panduan ini.

Juli 2024
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Dr. Kiki Yuliati, M.Sc.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
BAB II PRAKTIK KERJA LAPANGAN DALAM KURIKULUM MERDEKA	4
A. Tujuan PKL	5
B. Manfaat PKL	6
C. Penjaminan Mutu	7
BAB III PERENCANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	9
A. Penyusunan Naskah Kerjasama dengan Dunia Kerja	10
B. Perencanaan Pembelajaran PKL	14
C. Perangkat Ajar PKL	16
D. Perencanaan Implementasi PKL	16
E. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Pada Perencanaan PKL di Dunia Kerja	19
BAB IV PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	21
A. Strategi Implementasi Mata Pelajaran PKL	22
B. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	24
C. Pemantauan Pelaksanaan PKL	25
D. Asesmen PKL	26
BAB V MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	27
A. Monitoring dan Evaluasi oleh Manajemen Sekolah	28
B. Parameter Monitoring dan Evaluasi Praktik Kerja Lapangan	28
C. Monitoring dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan	29
BAB VI PENUTUP	30
LAMPIRAN	32
LAMPIRAN 1	
ANALISIS CP – TP - ATP PKL (DUNIA KERJA)	33
LAMPIRAN 2	
URNAL KEGIATAN PKL	38
LAMPIRAN 3	
CATATAN KEGIATAN PKL	39
LAMPIRAN 4	
LEMBAR OBSERVASI PKL	40



LAMPIRAN 5	
DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PKL	44
LAMPIRAN 6	
NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA	46
LAMPIRAN 7	
BENTUK KEWIRAUSAHAAN	48
A. Kewirausahaan baru	48
B. Kewirausahaan yang sudah berjalan	48
LAMPIRAN 8	
PERHITUNGAN PEMBAGIAN JAM PELAJARAN GURU	
MATA PELAJARAN PKL	50
LAMPIRAN 9	
RINGKASAN PELAKSANAAN PKL UNTUK DUNIA KERJA	53



BAB I

PENDAHULUAN





Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) merupakan satuan pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten untuk bekerja pada bidang tertentu sesuai dengan keahliannya. Keterserapan lulusan di dunia kerja¹ menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh SMK/MAK beserta pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan. Penguatan keterampilan teknis (*hard skills*) dan keterampilan non-teknis (*soft skills*) merupakan kunci untuk meningkatkan angka kebekerjaan lulusan SMK/MAK. Pembelajaran langsung di dunia kerja menjadi kebutuhan peserta didik SMK/MAK agar dapat mengasah kompetensi dan menguatkan budaya kerja. Oleh karena itu, penting sekali dibangun kerjasama antara SMK/MAK dengan dunia kerja.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik, Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi Peserta Didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Penyelenggaraan PKL di SMK/MAK yang tidak dapat dilaksanakan di dunia kerja dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kewirausahaan dan/atau pembelajaran berbasis proyek dalam bentuk *Teaching Factory* (Tefa) berdasarkan kebutuhan dunia kerja. PKL dapat dilaksanakan di dalam atau luar negeri secara luar jaringan (*luring*) atau dalam jaringan (*daring*) sesuai dengan ketentuan. Mata pelajaran PKL dilaksanakan di satuan pendidikan dan dunia kerja.

Selanjutnya pada Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, ditetapkan bahwa PKL merupakan salah satu mata pelajaran (*mapel*) sebagai wahana pembelajaran di dunia kerja. Pada Kurikulum Merdeka, PKL menjadi mata pelajaran yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik SMK/MAK dengan ketentuan sekurang-kurangnya selama 1 semester atau 16 minggu efektif setara dengan 736 jam pelajaran di kelas XII pada SMK/MAK program 3 tahun dan sekurang-kurangnya 10 bulan setara dengan 1.216 jam pelajaran di kelas XIII pada SMK/MAK program 4 tahun.

Sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek tersebut, SMK/MAK bersama dengan mitra dunia kerja berkewajiban untuk membuat perencanaan pembelajaran yang meliputi: menganalisis Capaian Pembelajaran (CP), serta menyusun Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).

¹ Dunia kerja mengacu pada klausul Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Pasal 4. Dunia kerja yang dimaksud adalah dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, instansi pemerintah, atau lembaga lainnya.

Pada CP tersebut ditegaskan bahwa PKL merupakan bentuk penyelarasan pembelajaran untuk dilaksanakan di dunia kerja. Selain pelaksanaan, asesmen PKL juga direncanakan dalam perencanaan pembelajaran. Pembelajaran PKL diselenggarakan berbasis proses bisnis dan mengikuti Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku di dunia kerja.

Sebagai mata pelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, pelaksanaan PKL mengacu pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka. Panduan PKL sebagai mata pelajaran disusun untuk dapat menjadi rujukan bagi pembelajaran PKL SMK/MAK.

B Tujuan



Panduan mata pelajaran PKL ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam menyelenggarakan PKL sebagai mata pelajaran pada Kurikulum Merdeka.

C Ruang Lingkup



Ruang lingkup panduan meliputi: 1) Latar belakang dan tujuan panduan; 2) Praktik Kerja Lapangan dalam Kurikulum Merdeka; 3) Perencanaan Praktik Kerja Lapangan; 4) Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan; dan 5) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.



BAB II

PRAKTIK KERJA LAPANGAN DALAM KURIKULUM MERDEKA



A Tujuan PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menginternalisasi dan menerapkan keterampilan karakter dan budaya kerja serta menerapkan, meningkatkan, dan mengembangkan penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan konsentrasi keahliannya.

Tujuan mapel PKL meliputi:

1. internalisasi *soft skills* di dunia kerja;
2. penerapan *hard skills* yang dikuasai pada pekerjaan yang sesungguhnya sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku;
3. peningkatan dan pengembangan *hard skills* dalam bidang tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja; dan
4. penyiapan kemandirian peserta didik untuk berwirausaha.

Berbeda dengan PKL, terdapat istilah lain yang sering digunakan dan diinterpretasikan seolah sama dengan PKL, yaitu magang. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Secara umum, Perbedaan antara PKL dan magang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.1 Perbedaan PKL dan Magang

Praktik Kerja Lapangan	Magang
Pesertanya adalah peserta didik SMK/MAK	Pesertanya adalah masyarakat umum
Bagian pembelajaran di SMK/MAK	Bagian dari sistem pelatihan kerja
Di bawa bimbingan instruktur dunia kerja dan guru pembimbing	Di bawah bimbingan instruktur dunia kerja
Usia Sekolah	Usia diatas 17 tahun untuk magang di dalam negeri dan Usia 18 tahun untuk magang di luar negeri
Dilaksanakan sesuai dengan kompetensi keahlian yang di pelajari di SMK/MAK	Bebas memilih kompetensi keahlian yang ingin dikembangkan
Mengacu kepada Permendikbud no 50 tahun 2020	Mengacu kepada Permenaker Nomer 08 Tahun 2008 (luar negeri) Permenaker Nomer 6 Tahun 2020 (dalam negeri)

B

Manfaat PKL



Beberapa manfaat PKL SMK/MAK adalah sebagai berikut.

1. Manfaat bagi peserta didik

- Meningkatkan kompetensi keahlian yang telah diperoleh di sekolah.
- Bertambahnya wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman kerja secara langsung/nyata dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada mutu proses dan hasil kerja.
- Meningkatkan *hard skills* serta tertanamnya etos kerja yang tinggi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) dan budaya di dunia kerja.
- Memperkuat kemampuan produktif sesuai dengan konsentrasi keahlian yang dipelajari.
- Mengembangkan kemampuan sesuai perkembangan dunia kerja dengan bimbingan/arahan pembimbing dunia kerja dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja.
- Memperkuat karakter sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya dunia kerja dan sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

- g. Mengembangkan kemandirian belajar dan kemampuan kewirausahaan peserta PKL, dan peningkatan keahlian profesional sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidup dan pengembangan diri secara berkelanjutan.
 - h. Menumbuhkan keahlian melalui peningkatan kepercayaan diri yang selanjutnya akan mendorong mereka untuk meningkatkan keahlian profesionalnya pada tingkat yang lebih tinggi.
2. Manfaat bagi sekolah
- a. Menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara sekolah dan dunia kerja.
 - b. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja langsung selama PKL.
 - c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas program sekolah melalui sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, *teaching factory*, pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL.
 - d. Terwujudnya program penguatan pendidikan karakter secara terencana dan implementatif, khususnya nilai-nilai karakter budaya kerja.
3. Manfaat bagi dunia kerja tempat PKL
- a. Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK/MAK untuk perkembangan dunia kerja.
 - b. Dunia kerja dapat mengenal kualitas peserta PKL dan mendapatkan calon karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.
 - c. Meningkatkan citra positif dunia kerja karena dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan.
 - d. Dunia kerja tempat PKL lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekolah sehingga dapat menjadi wahana dalam promosi produk.
 - e. Dunia kerja tempat PKL dapat mengembangkan produk/jasa sesuai dengan kebutuhan sembari melatih *soft skills* dan *hard skills* peserta didik PKL.

C Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Kegiatan ini perlu dilakukan mengingat PKL memiliki fungsi strategis dalam pencapaian mutu lulusan SMK/MAK. Penjaminan mutu dilakukan untuk menjaga kualitas dari pembelajaran dan pelaksanaan PKL pada dunia kerja maupun kegiatan pengganti PKL. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penjaminan mutu meliputi: Direktorat SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah, manajemen SMK/MAK, Koordinator PKL, Guru mapel PKL, dan Instruktur PKL di dunia kerja. Pemangku kepentingan harus bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sebagai berikut:

1. Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek menyusun dan menyosialisasikan panduan PKL dengan melibatkan berbagai pihak sehingga aplikatif bagi satuan pendidikan SMK/MAK pelaksana Kurikulum Merdeka.
2. Pemerintah Daerah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya diharapkan dapat mendorong dunia kerja dan industri untuk menyediakan tempat PKL bagi peserta didik SMK/MAK, memfasilitasi penjuruan dan penyusunan naskah kerjasama PKL Luar Negeri, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKL. Strategi pembinaan dan pengawasan PKL oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah yang mengacu pada panduan ini.
3. Manajemen SMK/MAK menetapkan koordinator kegiatan dan guru mapel PKL yang sesuai kualifikasi serta memantau proses pelaksanaan PKL dan dokumen yang diperlukan. Selain itu, memfasilitasi keperluan kegiatan sesuai kebutuhan, diantaranya: dokumen administrasi, uji fisik, uji kesehatan, dan persyaratan lainnya yang diperlukan. Manajemen SMK/MAK bersama Dinas Pendidikan Provinsi atau sesuai dengan kewenangan juga dapat melakukan evaluasi darurat bahkan mengambil proses hukum jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama ataupun terjadi kekerasan, perundungan, dan intoleransi.
4. Koordinator PKL melaksanakan identifikasi dan penjuruan dunia kerja, menentukan tempat PKL yang sesuai dengan program/konsentrasi keahlian, menentukan strategi pelaksanaan PKL di dunia kerja secara daring atau luring, membagi tugas guru mapel PKL atau kegiatan lain sebagai pengganti PKL, memantau pelaksanaan pembimbingan, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKL.
5. Guru mapel PKL merencanakan pembelajaran PKL bersama dengan instruktur dunia kerja, melakukan kegiatan pembimbingan, memantau pembelajaran PKL, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran PKL.
6. Instruktur Dunia Kerja merencanakan pembelajaran PKL bersama guru mapel PKL sesuai pekerjaan yang dilaksanakan peserta didik serta membimbing dan mengawasi peserta didik di dunia kerja saat PKL sedang berlangsung.



BAB III

PERENCANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN





Sekolah mengidentifikasi tempat pelaksanaan PKL berdasarkan mitra dunia kerja yang telah dimiliki sekolah serta usulan peserta didik dan/atau orang tua. Selanjutnya, sekolah melakukan peninjauan dengan dunia kerja untuk mengetahui potensi kerja sama untuk pembelajaran PKL. Penempatan peserta didik pada pelaksanaan PKL disesuaikan dengan konsentrasi keahlian, kompetensi peserta didik, serta pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penting bagi sekolah melakukan pemetaan tersebut untuk penempatan peserta didik di dunia kerja, beserta guru mapel PKL yang akan membimbing dan memantau peserta didik selama melakukan PKL. Pelaksanaan PKL dapat dilakukan di lebih dari satu tempat PKL untuk memenuhi lingkup kompetensi yang hendak dicapai. Pada kondisi tertentu, tempat pelaksanaan PKL dapat dilaksanakan di *Teaching Factory* (Tefa) dan tempat lainnya selain di dunia kerja. Setelah dilakukan peninjauan dan pemetaan peserta didik, sekolah perlu menyusun naskah kerjasama sebagai bentuk pengaturan teknis dari pelaksanaan PKL.

Naskah kerja sama tersebut menjadi acuan baik bagi sekolah maupun dunia kerja dalam menjalankan program PKL. Segala sesuatu hal terkait pelaksanaan PKL harus tertuang dalam naskah kerja sama tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan naskah kerjasama pada PKL Dalam Negeri maupun PKL Luar Negeri dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Naskah Kerjasama PKL Dalam Negeri

PKL dalam negeri dimulai setelah ada perjanjian kerja sama antara satuan pendidikan SMK/MAK dengan dunia kerja yang tertuang dalam naskah kerja sama. Pelaksanaan PKL SMK/MAK di dalam negeri perlu menyusun naskah perjanjian kerja sama antara satuan pendidikan dengan dunia kerja mitra. Naskah perjanjian kerja sama tersebut didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam naskah perjanjian kerja sama perlu memuat setidaknya butir atau klausul dibawah ini (contoh naskah kerja sama pada Lampiran 6), yaitu:

- a. Tujuan kerja sama
- b. Penyebutan nama pihak yang terlibat
- c. Penjelasan tugas peserta didik
- d. Penjelasan tugas dunia kerja penerima peserta didik
- e. Bentuk kerja sama / ruang lingkup (PKL, peningkatan kompetensi guru dsb)
- f. Hak dan Kewajiban para pihak (Sekolah, Dunia Kerja, Dinas Pendidikan Provinsi)
- g. Alamat korespondensi
- h. Penyelesaian perselisihan
- i. Peraturan yang digunakan apabila ada perselisihan
- j. Jangka waktu kerja sama

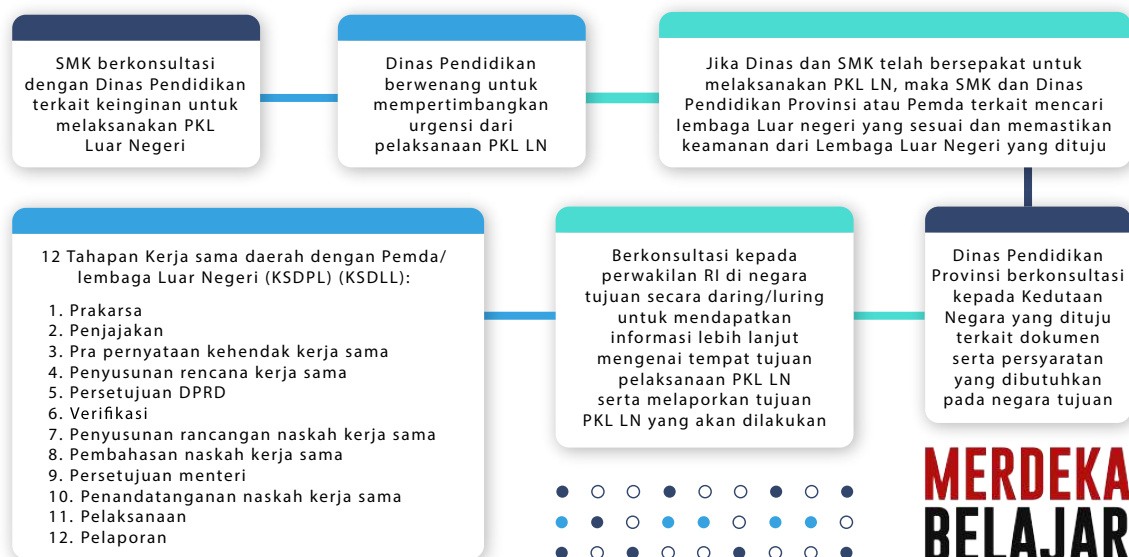
2. Naskah Kerjasama PKL Luar Negeri

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, program-program kerja sama di luar negeri berada di dalam kewenangan pemerintah daerah (Pemda). Pembinaan SMK/MAK berada di bawah dinas pendidikan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Oleh karena itu, seluruh pelaksanaan program PKL luar negeri harus mengacu kepada naskah kerja sama antara pemerintah daerah yang menaungi SMK/MAK tersebut dengan pihak luar negeri.

Pelaksanaan PKL SMK/MAK di luar negeri harus mengacu kepada beberapa hal di bawah ini, yaitu:

- Peraturan yang berlaku di negara tempat tujuan PKL termasuk peraturan di dunia kerja tempat pelaksanaan PKL.
- Naskah kerjasama antara Pemerintah Daerah Dalam Negeri dengan Pihak Luar Negeri,

Dalam Penyusunan Naskah Kerjasama antar Pemda dalam negeri dengan pihak luar negeri yang meliputi perjanjian kerja sama PKL luar negeri mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020 mengenai Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Berikut ini merupakan langkah yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan bersama dengan Dinas Pendidikan, pada **Gambar 3.1.**



Gambar 3.1. Alur peninjakan PKL Luar Negeri.

- a. SMK/MAK berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan terkait keinginan untuk melaksanakan PKL Luar Negeri serta memastikan apakah sudah ada payung hukum/perjanjian *sister province* atau *sister city* antara pemerintah daerah pada provinsinya dengan pemerintah daerah luar negeri.
- b. Dinas Pendidikan provinsi atau sesuai kewenangan mempertimbangkan usulan serta urgensi dari keinginan sekolah untuk melaksanakan PKL Luar Negeri. Pertimbangan dapat meliputi benefit atau keuntungan apa saja yang didapatkan jika PKL luar negeri dilaksanakan. Misalnya: pengembangan kompetensi di dunia kerja luar negeri lebih baik dibandingkan dalam negeri serta lebih efisien jika dilakukan di luar negeri (jarak dan biaya).
- c. Apabila Dinas Pendidikan dan sekolah telah bersepakat untuk melaksanakan PKL Luar Negeri maka Dinas Pendidikan perlu untuk memfasilitasi proses penyusunan naskah kerjasama dengan pihak luar negeri hingga memastikan bahwa lembaga atau pihak luar negeri tersebut aman untuk dijadikan tujuan pelaksanaan PKL. Lembaga atau pihak luar negeri dapat diusulkan oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan.
- d. Setelah mendapatkan lembaga atau pihak luar negeri yang akan dijadikan tempat pelaksanaan PKL serta memastikan bahwa tempat tujuan tersebut aman serta berizin. Dinas Pendidikan dapat berkonsultasi pada kedutaan besar negara tujuan terkait persyaratan maupun dokumen yang dibutuhkan.
- e. Selain berkonsultasi ke kedutaan besar, Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan perlu berkonsultasi pada perwakilan RI pada negara yang dituju untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail mengenai negara maupun tempat pelaksanaan PKL serta melaporkan tujuan dan teknis dari pelaksanaan PKL. Konsultasi dengan Perwakilan RI dapat dilakukan secara daring atau luring. Konsultasi secara daring dapat dilakukan dengan menghubungi email negara tujuan yang tertera pada laman http://www.kemlu.go.id/ibu_kota_negara_tujuan_PKL, contoh: <http://www.kemlu.go.id/newyork>.
- f. Kemudian, Dinas Pendidikan perlu menyusun naskah kerja sama dengan lembaga atau pihak luar negeri yang mengacu PP No. 28 Tahun 2018. Terdapat 12 tahapan yang perlu dilalui dalam melakukan kerjasama dengan lembaga atau pihak luar negeri. Penjelasan detail terkait 12 tahapan kerjasama dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.
- g. Setelah naskah kerja sama tersebut disetujui oleh Menteri dan ditandatangani oleh Kepala Daerah, sekolah perlu memberikan salinan naskah kerja sama dan menginformasikan mengenai teknis keberangkatan kepada Direktorat SMK, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, serta kembali melaporkan pada perwakilan RI di Luar Negeri di mana kerja sama tersebut akan dijalankan.





Gambar 3.2 Penjelasan 12 Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Pemda/lembaga Luar Negeri (KSDPL)/(KSDLL)

Sebelum PKL di luar negeri dilaksanakan, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu pemetaan peserta didik dimana kriteria pelaksanaan PKL luar negeri harus sesuai dengan regulasi di Indonesia dan di negara tujuan, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan di tempat pelaksanaan PKL negara tujuan. Selanjutnya, persiapan oleh satuan pendidikan dan peserta didik perlu dilakukan terutama terkait penguasaan bahasa negara tujuan, pengurusan visa, dan pembekalan peserta didik.

Persiapan yang harus dilakukan peserta didik sebelum keberangkatan adalah mempersiapkan kemampuan berbahasa dan budaya negara tujuan tempat PKL, termasuk budaya di tempat PKL. Bahasa negara tujuan penting untuk dikuasai oleh peserta didik yang akan melaksanakan PKL di luar negeri. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa percakapan sehari-hari untuk memudahkan komunikasi antara peserta didik dengan instruktur dunia kerja. Prasyarat penguasaan bahasa asing mengikuti aturan dari negara tujuan PKL. Selain penguasaan bahasa, pemahaman mengenai pengetahuan umum dan budaya dari negara dan lembaga tujuan juga menjadi hal penting yang perlu dipersiapkan.

Visa adalah keterangan atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang atau perwakilan suatu negara untuk izin tinggal atau bepergian di negara tersebut.

Setiap negara memiliki jenis dan persyaratan tersendiri dalam proses pengajuan visa. Penggunaan visa dan dokumen pendukung lainnya perlu dikonsultasikan pada kedutaan besar negara tujuan, dengan tujuan kelancaran, keamanan, dan perlindungan peserta didik PKL selama berada di luar negeri. Visa yang dikeluarkan ditentukan oleh kedutaan besar negara tujuan PKL. Jenis visa akan lebih mudah ditentukan jika sudah ada surat undangan/*calling* visa dari lembaga/tempat PKL. Hal tersebut memudahkan kedutaan besar mengeluarkan visa yang sesuai dengan tujuan PKL.

B Perencanaan Pembelajaran PKL



Perencanaan PKL dijabarkan dari CP mapel PKL, dilaksanakan oleh SMK/MAK bersama dunia kerja, menjadi dokumen Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan pembelajaran (ATP), perencanaan pembelajaran dan asesmen. Tujuan Pembelajaran (TP) merupakan rumusan target kompetensi yang dikuasai peserta didik setelah melaksanakan PKL. Berdasarkan TP, sekolah bersama dunia kerja mengidentifikasi potensi pekerjaan/kompetensi yang ada di dunia kerja untuk penyusunan ATP/program PKL yang akan dilaksanakan. Dokumen perencanaan pembelajaran dapat menggunakan informasi atau dokumen kerja sesuai kebijakan dunia kerja tempat PKL. Dokumen perencanaan PKL berfungsi sebagai dasar pelaksanaan dan pemantauan. Perencanaan disusun berdasarkan CP Mapel PKL yang disajikan pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Elemen dan Capaian Pembelajaran Mapel PKL

Elemen	Capaian Pembelajaran
<i>Internalisasi dan Penerapan Soft Skills</i>	Peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas (antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab), etos kerja, bekerja secara mandiri dan/atau secara tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap norma, K3LH, dan POS yang berlaku di dunia kerja.
Penerapan <i>Hard Skills</i>	Peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan sesuai POS yang berlaku di dunia kerja.
Peningkatan dan Pengembangan <i>Hard Skills</i>	Peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis baru/atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari di satuan sesuai konsentrasi keahlian.
Penyiapan Kemandirian Berwirausaha	Peserta didik mampu melakukan analisis usaha terkait dunia kerja secara mandiri .

Berdasarkan CP mapel PKL sekolah bersama dunia kerja tempat PKL, menyusun Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) PKL, dan perangkat ajar PKL.

a. Tujuan Pembelajaran (TP) - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

Tujuan Pembelajaran (TP) merupakan rumusan kompetensi yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dan dunia kerja yang mengacu kepada CP dan kontekstual dengan karakteristik dunia kerja. Satuan pendidikan bersama dunia kerja melakukan identifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar menyusun TP agar sesuai dengan pekerjaan yang tersedia di setiap dunia kerja tempat PKL akan dilaksanakan. Berdasarkan TP yang telah dirumuskan, selanjutnya, disusun ATP berupa urutan kegiatan pelaksanaan PKL. Kemudian dokumen TP-ATP diketahui oleh kedua belah pihak.

b. Program PKL

Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran (TP-ATP) kemudian digunakan sebagai acuan untuk menyusun program PKL. Sekolah bersama dunia kerja tempat PKL menyusun program berdasarkan TP - ATP memuat pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan beserta jadwal waktu pelaksanaannya. Durasi dan urutan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi dunia kerja, misalnya volume kerja dan peralatan yang dimiliki, sehingga program PKL tiap peserta didik tidak selalu sama. Dokumen program disahkan oleh kedua belah pihak.

c. Perangkat Ajar PKL

Perangkat ajar dalam pelaksanaan PKL meliputi segala informasi dan dokumen dalam pelaksanaan kegiatan untuk membimbing peserta didik. Perangkat ajar PKL merupakan media komunikasi antara peserta didik dengan guru mapel PKL dan/atau instruktur dunia kerja. Dokumen tersebut disusun sesuai ketentuan dan proses kerja masing-masing dunia kerja tempat PKL.

1. Informasi dasar pekerjaan

Pelaksanaan kerja memerlukan informasi sebagai dasar kerja. Dalam rangka peningkatan kapabilitas peserta didik, informasi dasar pekerjaan sangat diperlukan supaya peserta didik memahami pekerjaan dan proses kerja yang akan ia lakukan. Informasi yang diperlukan dapat berupa: konsep, buku manual, gambar kerja, dan lain-lain. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan program PKL. Informasi dasar pekerjaan ini dapat disiapkan oleh guru pengampu mapel PKL dan instruktur dunia kerja.

2. Prosedur kerja

Setiap tempat PKL memiliki mekanisme kerja atau prosedur yang dikembangkan sesuai situasi dan kondisi. Dalam melaksanakan PKL, peserta didik harus mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku di dunia kerja tempat PKL.

Untuk membimbing peserta didik dalam melaksanakan PKL, guru pengampu mapel PKL dan instruktur dunia kerja perlu menyampaikan prosedur kerja dan pemantauan keterlaksanaan pekerjaan.

3. Jurnal PKL

Peserta didik melaksanakan PKL berdasarkan program yang telah disusun. Kegiatan peserta didik perlu dipantau oleh instruktur dunia kerja dan guru mapel PKL. Dokumen pemantauan berupa jurnal kegiatan yang diisi oleh peserta didik dan diketahui/diberikan catatan oleh pembimbing dan instruktur. Pemantauan kegiatan dapat dilakukan secara fisik atau menggunakan sistem informasi Jurnal PKL berisi kegiatan yang dilaksanakan serta keterangan unit kerja/tempat pelaksanaannya. Contoh Jurnal PKL dapat dilihat pada lampiran.

C

Perencanaan Penempatan Peserta Didik PKL



Sebelum menempatkan peserta didik ke dunia kerja, sekolah sudah mengidentifikasi dunia kerja berdasarkan kebutuhan konsentrasi keahlian dan potensinya sebagai tempat PKL. Penjajakan terhadap dunia kerja ditujukan untuk mengetahui potensi kerja sama sebagai tempat PKL. Penempatan peserta didik pada pelaksanaan PKL disesuaikan dengan kompetensi peserta didik serta pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sekolah harus melakukan pemetaan untuk penempatan peserta didik serta guru mapel PKL. Pelaksanaan PKL dapat dilakukan di lebih dari satu tempat PKL untuk peserta didik yang sama sesuai dengan lingkup kerja dan kompetensi yang hendak dicapai. Penempatan peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat disesuaikan dengan dunia kerja atau ditempatkan pada kegiatan pengganti PKL.

D

Perencanaan Implementasi PKL



Pada Kurikulum Merdeka, PKL merupakan mata pelajaran yang menjadi bagian dalam struktur intrakurikuler kurikulum. Pelaksanaan PKL dapat dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai kondisi dan karakteristik konsentrasi keahlian atau kompetensi yang akan dikuasai dalam pelaksanaan PKL. Pada konsentrasi keahlian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), PKL dapat dilaksanakan secara daring dengan pengawasan dari dunia kerja. Adapun pada konsentrasi keahlian lainnya, PKL dilaksanakan secara luring. Pada keadaan tertentu seperti bencana alam, bencana non-alam, dan kondisi geografis tertentu yang membuat PKL secara luring tidak memungkinkan, PKL dapat dilakukan secara daring dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis dari dunia kerja. Waktu pelaksanaan PKL di dunia kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara SMK/MAK dan dunia kerja. Pelaksanaan PKL tersebut dapat menggunakan Sistem Pelatihan Berotasi atau *Training Rotation System* (TRS) atau sistem pelatihan lain yang sesuai.

Rotasi dapat dilakukan dalam 1 (satu) dunia kerja pada divisi atau bidang yang berbeda dan/atau di berbagai dunia kerja sesuai dengan capaian pembelajaran dan disepakati oleh satuan pendidikan dengan dunia kerja. Pelaksanaan PKL harus berorientasi pada kepentingan peserta didik usia sekolah. PKL sebaiknya tidak dilaksanakan pada hari libur nasional, kecuali dunia kerja yang berkaitan dengan pelayanan umum. Jika tempat PKL memberlakukan sistem kerja giliran (*shift*), peserta didik PKL tidak diperbolehkan bertugas pada giliran malam. Namun, pelaksanaan PKL tetap ditentukan berdasarkan perencanaan pembelajaran sesuai kesepakatan dengan dunia kerja tempat PKL yang tertuang dalam naskah kerja sama. Apabila karakteristik pekerjaan mengharuskan peserta didik bekerja pada waktu-waktu tersebut, diperlukan tambahan butir perjanjian kerja sama antar satuan pendidikan dengan dunia kerja untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja peserta PKL.

Pada kondisi PKL tidak memungkinkan dilaksanakan di dunia kerja, SMK/MAK dapat menyelenggarakan bentuk pembelajaran lain pengganti PKL, yaitu kegiatan kewirausahaan dan pembelajaran berbasis proyek berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang dapat bekerja sama dengan *teaching factory* yang ada di SMK/MAK atau di SMK/MAK sekitarnya. Mekanisme kegiatan pengganti PKL dilakukan sesuai dengan mekanisme pada umumnya.

Kegiatan PKL dapat diganti dengan kegiatan lain jika satuan pendidikan menemui kondisi sebagai berikut:

1. Tidak terdapat dunia kerja yang relevan dengan bidang atau konsentrasi keahlian dari peserta didik dalam lingkup satu kabupaten atau kota (satuan pendidikan menyampaikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan yang berwenang bahwa melakukan kegiatan pengganti PKL dan disetujui oleh dinas pendidikan provinsi), atau;
2. Dunia kerja yang relevan di wilayah kabupaten/kota tidak dapat menampung peserta didik untuk PKL (dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pendidikan yang melampirkan surat balasan dari dunia kerja)².
3. Peserta didik dengan kebutuhan khusus (PDBK) yang kesulitan untuk melaksanakan PKL di dunia kerja pada umumnya. Peserta didik dengan kebutuhan khusus (PDBK) dibuktikan dengan hasil asesmen atau surat keterangan dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten lainnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan, dalam hal penyelenggaraan PKL tidak dapat dilaksanakan di dunia kerja (dunia usaha/dunia industri/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Instansi Pemerintah/Lembaga lainnya), maka kegiatan pembelajaran lain pengganti PKL, yaitu:

² untuk daerah yang dunia kerjanya terbatas dan umum terjadi pada SMK yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal)

1. Kegiatan Kewirausahaan

Kegiatan kewirausahaan perlu diprogramkan oleh sekolah dengan terencana. Kewirausahaan yang menjadi pengganti PKL dapat berupa kewirausahaan rintisan yang belum lama beroperasi (*startup*) maupun kewirausahaan yang sudah berjalan oleh peserta didik. Baik kewirausahaan yang baru berjalan maupun sudah berjalan, harus sesuai dengan program keahlian peserta didik di SMK/MAK. Untuk kewirausahaan yang tidak sesuai dengan program keahlian harus sudah berjalan selama minimal satu tahun dan sesuai kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)³. Adapun TP, ATP, Perencanaan Pembelajarannya dapat disusun oleh guru mapel Projek Kreatif Kewirausahaan dan guru pengampu mapel PKL bersama praktisi kewirausahaan⁴.

2. Pembelajaran Berbasis Projek melalui Model *Teaching Factory*

Pembelajaran berbasis projek berdasarkan kebutuhan dunia kerja dapat dilakukan melalui penerapan model *Teaching Factory* (Tefa). Tefa merupakan model pembelajaran yang mengoptimalkan kurikulum, sumber daya, dan sumber daya manusia di SMK/MAK dengan menyelaraskan proses produksi dan standar di dunia kerja. Tefa pada SMK/MAK bukan dibangun secara khusus, akan tetapi dengan memformulasikan, memanfaatkan, menata dan mengkondisikan sejumlah komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah sedemikian rupa, sehingga mencerminkan ekosistem pabrik atau dunia kerja. Rancangan induk (*grand design*) Tefa SMK/MAK menyatakan bahwa Tefa adalah suatu konsep pembelajaran di SMK/MAK berbasis produksi (barang/jasa) yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di dunia kerja dan dilaksanakan dalam suasana seperti di lingkungan dunia kerja. Dalam pelaksanaan Tefa, kemitraan dengan pihak dunia kerja, dukungan pemerintah daerah, orang tua murid, masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Tefa berbasis produksi. Produk yang dihasilkan berupa barang atau jasa yang benar-benar ada, digunakan, layak pakai, dan dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, serta sesuai dengan standar mutu produk dan proses produksinya sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh dunia kerja. Ketentuan sebagaimana yang berlaku di dunia kerja tersebut harus diterapkan atau diadopsi sepenuhnya di SMK/MAK yang mengembangkan model pembelajaran Tefa.

³ Kriteria UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

⁴ Contoh bentuk kewirausahaan ada pada Lampiran 7



Hal-hal yang harus diperhatikan selama program PKL berlangsung baik di dalam maupun di luar negeri adalah sebagai berikut.

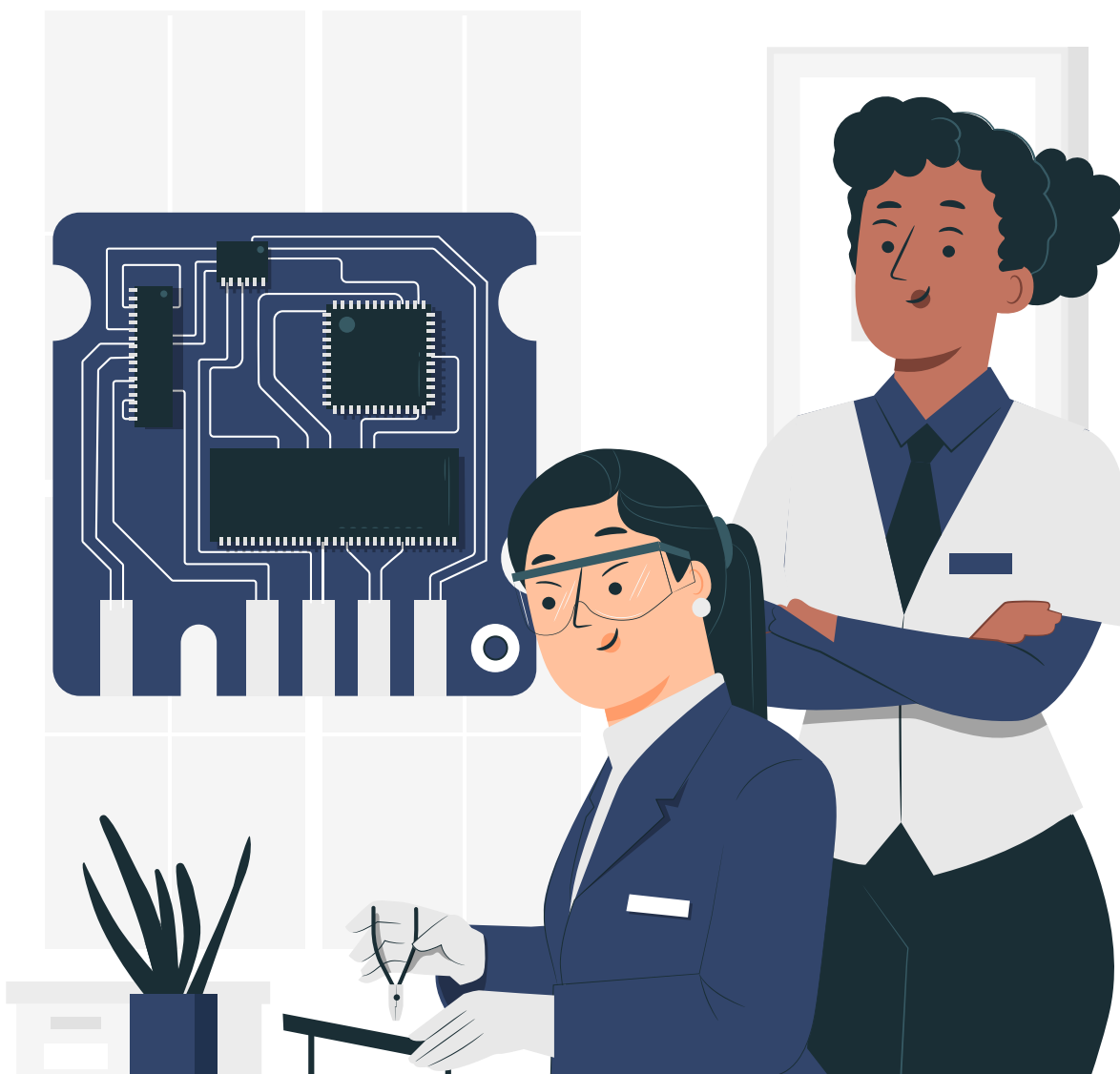
1. Peserta didik berhak mendapatkan surat keterangan/sertifikat keikutsertaan PKL yang diterbitkan oleh dunia kerja. Apabila peserta didik melaksanakan kewirausahaan dan pembelajaran berbasis proyek sebagai pengganti PKL, sertifikat diterbitkan oleh satuan pendidikan.
2. Peserta PKL mengikuti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tersebut diberikan oleh dunia kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Institusi dunia kerja dapat memberikan fasilitas dan/atau insentif kepada peserta PKL berupa transportasi dan akomodasi, konsumsi, uang saku, dan/atau fasilitas insentif lainnya. Pemberian fasilitas dan/atau insentif disesuaikan dengan kemampuan institusi dunia kerja. Fasilitas tersebut harus tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.
4. Kesesuaian antara konsentrasi keahlian peserta didik dengan pelaksanaan PKL.
5. Kesesuaian antara kompetensi/konsentrasi keahliannya dengan pembelajaran dalam bentuk pekerjaan/projek/tugas yang dikerjakan peserta didik.
6. Memperhatikan beban kerja dan jam kerja agar tidak terjadi eksploitasi terhadap peserta didik.
7. Tanggung jawab peserta didik tidak menjadi pemimpin proyek (*project leader*), peserta didik dalam PKL hanya bertugas sebagai tenaga pendukung, bukan tenaga utama).
8. Kesesuaian perjanjian atau kontrak kerja sama. Peserta didik yang telah menyelesaikan PKL tidak diperkenankan bekerja di tempat PKL tanpa adanya perjanjian atau kontrak kerja sama.
9. Peserta didik hanya diperbolehkan untuk mendapatkan giliran kerja (*shift*) pagi dan siang (tidak diperkenankan mendapatkan giliran kerja (*shift*) malam). Apabila karakteristik pekerjaan mengharuskan peserta didik bekerja pada waktu-waktu tertentu, perlu dicantumkan pada perjanjian kerja sama antar satuan pendidikan dengan dunia kerja yang menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja peserta PKL.
10. Pemenuhan kewajiban dari dunia kerja yang harus sesuai dengan perjanjian kerja sama.
11. Terkait PKL luar negeri, dokumen perjalanan harus dipegang oleh masing-masing individu, tidak boleh ada penahan dokumen perjalanan.
12. Ancaman denda yang tidak sesuai dengan naskah perjanjian kerja sama oleh dunia kerja yang tidak tercantum di dalam naskah kerja sama.

13. Ketika dalam pelaksanaan PKL membutuhkan biaya praktik yang tidak dapat difasilitasi oleh dunia kerja maka sekolah mengupayakan pemenuhan biaya tersebut dengan menyusun rencana anggaran yang disampaikan orang tua/wali dan mengacu kepada naskah perjanjian kerjasama.
14. Jika terjadi kekerasan, perundungan, dan intoleransi maka pihak Manajemen SMK/MAK dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan perlindungan terhadap peserta didik bahkan mengambil proses hukum.



BAB IV

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN





Mata pelajaran PKL dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran peserta didik di dunia kerja. Pelaksanaan mapel PKL merupakan proses belajar di dunia kerja dengan mengaplikasikan teori dan praktik yang dilakukan di sekolah. Peserta didik melaksanakan praktik kerja secara langsung berdasarkan kesepakatan program dengan bimbingan dan arahan instruktur PKL serta pendampingan oleh guru mapel PKL. Strategi Implementasi mapel PKL dilaksanakan sebagai berikut.

1. Pembekalan

Sebelum peserta didik melaksanakan PKL di dunia kerja, satuan pendidikan melakukan pembekalan. Program pembekalan PKL yang diberikan kepada peserta didik bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik pada saat PKL di dunia kerja. Pembekalan dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu pembelajaran reguler dan pembekalan sebelum keberangkatan. Pembelajaran reguler dipersiapkan oleh seluruh mata pelajaran intra dan kokurikuler yang dilaksanakan pada kelas X dan XI. Adapun pembekalan sebelum keberangkatan direncanakan secara khusus oleh sekolah dan dunia kerja. Lokasi pembekalan peserta didik dapat dilakukan baik di sekolah maupun di dunia kerja. Materi pembekalan PKL bagi peserta didik dapat meliputi dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: (a) Karakteristik budaya kerja di dunia kerja; (b) Aturan kerja di dunia kerja; (c) Orientasi lingkungan sosiokultural (d) Kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup; (e) survei lokasi PKL; (f) Penyusunan laporan kegiatan harian maupun laporan akhir; dan (g) Penilaian akhir. Selain pembekalan yang ditujukan kepada peserta didik, sosialisasi mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan PKL kepada orang tua/wali peserta didik juga perlu dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan agar orang tua memahami secara umum tujuan, pelaksanaan pembelajaran, serta hal-hal lainnya yang akan dilakukan peserta didik selama PKL.

2. Pembimbing dan Instruktur PKL

Terdapat dua pembimbing dalam pelaksanaan PKL, yaitu guru mata pelajaran PKL dari sekolah dan instruktur dari dunia kerja. Guru mapel PKL adalah seorang atau beberapa orang guru yang bersama-sama bertanggung jawab atas ketercapaian kompetensi pembelajaran PKL peserta didik. Instruktur PKL merupakan pembimbing dari pihak dunia kerja yang bertindak mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam melakukan pekerjaannya di dunia kerja. Keduanya melaksanakan tugas yang sama, yaitu memfasilitasi pembelajaran PKL peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bersama, sehingga penting untuk senantiasa berkolaborasi dalam pembelajaran PKL.

Kolaborasi yang dimaksud dapat meliputi: penyusunan rencana (program dan kompetensi), pelaksanaan (kehadiran dan pelaksanaan kerja), dan asesmen PKL. Dokumen pembimbingan dirancang agar dapat diakses oleh kedua pembimbing secara daring dan/atau luring.

Guru mapel PKL dapat terdiri dari unsur guru mata pelajaran kejuruan (termasuk matematika, bahasa Inggris, kewirausahaan dan mata pelajaran pilihan) dan guru mata pelajaran umum yang mengajar pada kelas X, XI, XII, hingga XIII. Jumlah guru mapel PKL dalam satu periode PKL ditentukan oleh satuan pendidikan dengan alokasi sebanyak 46 (empat puluh enam) Jam Pelajaran (JP).

Jumlah JP mapel PKL tersebut dapat diampu oleh beberapa guru sesuai situasi dan kebijakan setiap satuan pendidikan SMK/MAK. Guru yang ditunjuk sebagai pengampu mapel PKL (guru mapel PKL) diberikan pemahaman terkait proses PKL di dunia kerja dan pembimbingannya.

Berikut ini adalah beberapa pertimbangan terkait guru mapel PKL di SMK/MAK:

- a. Guru mapel PKL menguasai proses kerja pada dunia kerja.
- b. Pembelajaran pada satu lokasi PKL dapat dilaksanakan oleh satu orang guru atau beberapa orang guru yang berkolaborasi.
- c. Perhitungan jumlah JP bagi setiap guru mapel PKL didasarkan pada pembagian secara proporsional sesuai dengan jumlah peserta didik keseluruhan yang melaksanakan PKL pada satu sekolah.⁵

Secara umum, pembelajaran PKL sama dengan pembelajaran pada mapel lainnya, sehingga peran guru mapel PKL juga sama seperti guru mapel lain, namun PKL dilakukan di dunia kerja. Oleh karena itu, berikut beberapa tugas guru mapel PKL dan instruktur dunia kerja:

Tugas guru mapel PKL adalah:

- a. mengomunikasi penempatan peserta didik di lokasi penempatan PKL di dunia kerja;
- b. memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik selama pelaksanaan PKL
- c. menjadi fasilitator pembelajaran
- d. memastikan kehadiran peserta didik di tempat PKL
- e. melakukan pemantauan dan pembimbingan peserta didik dalam melakukan proses kerja sesuai dengan perencanaan pembelajaran serta ketentuan dan proses kerja yang berlaku di dunia kerja tempat PKL
- f. memastikan peserta didik mengisi jurnal harian PKL
- g. melakukan pencatatan terhadap perkembangan peserta didik

⁵ Contoh pembagian JP ada pada Lampiran 8

- h. melakukan proses asesmen PKL terhadap peserta didik dengan melibatkan penilaian dunia kerja
- i. jika terjadi kasus yang tidak diinginkan, terlibat dalam penyelesaian kasus di lokasi PKL;
- j. menjemput peserta didik PKL di akhir masa program PKL; dan
- k. memberikan bimbingan penulisan laporan PKL.

Tugas instruktur dunia kerja adalah:

- a. mengarahkan, membimbing, dan mementori peserta didik dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan pembelajaran dan kehidupan sosialnya di dunia kerja;
- b. memberikan penilaian hasil kerja peserta didik PKL; dan
- c. melaporkan kepada pihak sekolah secara berkala perkembangan peserta didik PKL dan jika terdapat kejadian tertentu di lokasi PKL yang perlu diketahui pihak satuan pendidikan.

B Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan



Kepala satuan pendidikan dan/atau guru mapel PKL mengantarkan peserta didik ke dunia kerja tempat berlangsungnya PKL. Sebelum melaksanakan PKL, para peserta PKL akan menjalani masa orientasi kerja yang dilaksanakan oleh instruktur dunia kerja. Masa orientasi kerja merupakan pengenalan tentang dunia kerja kepada peserta PKL. Pada masa orientasi kerja, para peserta PKL akan mendapatkan materi pembekalan yang meliputi profil perusahaan, tata tertib perusahaan, manajemen resiko, kesehatan, keselamatan kerja, gambaran tentang situasi sosio-kultural lingkungan, dan aspek kompetensi yang dinilai selama PKL. Materi pembekalan masa orientasi kerja dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di institusi tempat peserta melaksanakan PKL.

Pada saat pelaksanaan PKL, penempatan peserta didik di dunia kerja harus berdasarkan pada naskah kerja sama. Dasar dalam penempatan peserta PKL adalah ketersediaan kompetensi pada posisi dan jenis pekerjaan serta kapasitas dunia kerja tempat PKL. Penempatan peserta didik harus sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan PKL, penempatan juga didasarkan pada kesesuaian potensi peserta didik dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan di dunia kerja tempat PKL. Satuan pendidikan harus melaksanakan pemetaan peserta didik dan dunia kerja tempat PKL serta menetapkan guru mapel PKL, sedangkan instruktur PKL ditetapkan oleh dunia kerja.

Instruktur dunia kerja melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap peserta PKL. Tujuan pembimbingan ini adalah sebagai salah satu metode internalisasi tugas pekerjaan yang diberikan kepada peserta PKL di dunia kerja. Selama pelaksanaan PKL, selain dibimbing oleh instruktur dunia kerja peserta PKL juga dipantau oleh guru mapel PKL. Pemantauan oleh guru mapel PKL dapat dilakukan secara daring atau luring.

Secara umum, pelaksanaan PKL Luar Negeri serupa dengan PKL Dalam Negeri. Hanya saja pelaksanaan PKL di Luar Negeri harus mengacu pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) K-138 yang diratifikasi pada tahun 1973. Usia Minimum peserta didik yang akan melaksanakan PKL Luar Negeri harus sesuai dengan ketentuan peraturan pada negara tujuan. Indonesia ikut meratifikasi Konvensi ILO K-138 ini sehingga harus patuh pada peraturan tersebut.

Apabila SMK/MAK ingin melakukan PKL di luar negeri maka hendaknya memperhatikan ketentuan di atas dan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait Kerjasama Luar Negeri yang mengacu pada Permendagri No. 25 Tahun 2020, serta wajib untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Materi Pembekalan dan persiapan peserta didik perlu menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan dari negara serta lembaga luar negeri yang menjadi tempat pelaksanaan PKL Luar Negeri.

Pelaksanaan PKL disesuaikan dengan kesepakatan yang ada pada naskah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri. Proses keberangkatan serta kepulangan peserta didik yang melaksanakan PKL Luar Negeri perlu diantar dan dijemput oleh perwakilan guru maupun manajemen sekolah serta diketahui oleh Perwakilan RI di Luar Negeri.

C Pemantauan Pelaksanaan PKL



Proses pemantauan terhadap peserta didik dapat dilakukan guru mapel PKL dengan kunjungan ke tempat PKL atau berkomunikasi dengan dunia kerja tempat PKL. Selain itu, guru mapel PKL juga dapat melakukan pemantauan intensif dan berkala terhadap aktivitas PKL peserta didik yang dilakukan secara daring melalui berbagai kanal komunikasi. Guru mapel PKL kemudian berkoordinasi intensif dengan koordinator PKL dan Manajemen SMK/MAK (dalam hal ini Kepala Sekolah serta Wakil Kepala Sekolah) terkait hasil pemantauan terhadap peserta didik untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu terhadap program PKL yang sedang berlangsung. Penting bagi guru mapel PKL, koordinator PKL, manajemen SMK/MAK (Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PKL dapat mencapai Capaian Pembelajaran PKL sesuai dengan perencanaan yg telah dilakukan. Proses monitoring dapat disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing serta kebutuhan dunia kerja. Proses pemantauan yang dilakukan guru mapel PKL meliputi:

1. Kesesuaian penempatan peserta didik di dunia kerja dengan konsentrasi keahliannya;
2. Kesesuaian pelaksanaan praktik kerja lapangan dengan rencana kerja PKL;
3. Keterlaksanaan bimbingan oleh instruktur dunia kerja terkait penguasaan kompetensi peserta didik; dan
4. Keamanan serta keselamatan peserta didik selama melaksanakan PKL.

Asesmen PKL dilaksanakan berdasarkan Tujuan Pembelajaran (TP) dengan mengacu pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Bukti pencapaian CP berupa portofolio/kumpulan hasil peserta didik dari berbagai instrumen asesmen (awal, proses dan akhir). Asesmen memuat komponen secara komprehensif yang meliputi perkembangan peserta didik dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat berupa lembar sertifikat. Hasil asesmen disampaikan dalam rapor dengan mencantumkan keterangan dari dunia kerja mengenai kinerja peserta didik secara keseluruhan berdasarkan jurnal PKL serta sertifikat atau surat keterangan PKL dari dunia kerja.

1. Asesmen Awal

Asesmen awal dilakukan untuk menentukan tempat PKL peserta didik. Penempatan peserta didik dilaksanakan berdasarkan kesesuaian kompetensi yang dikuasai dan minat.

2. Asesmen Proses

Asesmen proses dilakukan oleh instruktur untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai indikator tujuan pembelajaran. Kegiatan asesmen proses dilakukan menggunakan lembar observasi. Apabila peserta didik belum menguasai indikator maka dilakukan pendampingan/pengarahan.

3. Asesmen Akhir

Asesmen akhir dilakukan oleh instruktur dan guru mapel PKL untuk mengukur penguasaan indikator tujuan pembelajaran. Asesmen akhir bukan rerata nilai dari beberapa kegiatan, namun merupakan akumulasi kecenderungan dari berbagai instrumen asesmen yang digunakan. Asesmen Akhir PKL dapat berupa: asesmen instruktur dunia kerja, penyusunan laporan PKL, dan presentasi Laporan PKL baik di Sekolah/dunia kerja.

Asesmen kegiatan pengganti PKL dapat dilakukan oleh:

- Praktisi kewirausahaan atau guru mapel Projek Kreatif Kewirausahaan jika melakukan kegiatan kewirausahaan;
- Manajemen Tefa jika melakukan kegiatan Tefa, dan
- Guru mapel PKL.



BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



A

Monitoring dan Evaluasi oleh Manajemen Sekolah



Monitoring dan Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan informasi untuk menilai suatu objek/kegiatan sehingga dapat diambil kesimpulan dan tindak lanjut terhadap objek/kegiatan tersebut. Monitoring dan Evaluasi program PKL dapat dilakukan oleh satuan pendidikan secara mandiri atau bersama-sama dengan dunia kerja mitra terhadap peserta didik yang menjalankan program PKL. Monitoring dan Evaluasi oleh peserta didik dan satuan pendidikan terhadap dunia kerja mitra juga perlu dilakukan. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan dunia kerja mitra pada program PKL selanjutnya. Selain itu, evaluasi darurat dapat dilakukan apabila terjadi situasi atau hal di luar perjanjian kerja sama antara satuan pendidikan dan dunia kerja mitra serta mengancam keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta didik. Evaluasi darurat yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk penghentian darurat program PKL, keberlanjutan dunia kerja sebagai mitra tempat PKL dan/atau bahkan proses hukum.

B

Parameter Monitoring dan Evaluasi Praktik Kerja Lapangan



Kegiatan monitoring dan evaluasi PKL meliputi beberapa parameter yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, antara lain: tata kelola, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan PKL.

1. Tata Kelola PKL

Parameter monitoring dan evaluasi tata kelola PKL, meliputi:

- a. Proses penjajakan/koordinasi dengan dunia kerja,
- b. Dokumen Kerjasama,
- c. Pembagian peran antara satuan pendidikan dan dunia kerja,

2. Perencanaan PKL

Parameter monitoring dan evaluasi perencanaan PKL, meliputi:

- a. Kesesuaian penempatan peserta didik di dunia kerja
- b. Analisis keputusan kegiatan pengganti PKL (jika dilaksanakan)
- c. Proses 12 tahapan kerja sama (jika melaksanakan PKL luar negeri).
- d. Perencanaan pembelajaran (modul ajar, format pemantauan, rencana asesmen, dll.),
- e. Penjaminan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pembelajaran PKL.



3. Pelaksanaan PKL

Parameter monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKL, meliputi:

- a. Pelaksanaan pembelajaran
- b. Pendampingan guru mata pelajaran PKL
- c. Pendampingan instruktur
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

4. Hasil Pelaksanaan PKL

- a. Peningkatan kerjasama sekolah dengan dunia kerja (sinkronisasi kurikulum, guru tamu, bantuan fasilitas, dll.)
- b. Keterserapan lulusan untuk melanjutkan bekerja di tempat PKL

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan tahapan PKL. Setiap tahapan dinilai sehingga program PKL dapat dikembangkan dan memberikan hasil yang lebih baik pada masa mendatang.

C Monitoring dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan

Proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKL juga perlu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya secara daring maupun luring. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penjaminan mutu terhadap kegiatan PKL. Dinas Pendidikan dapat melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan satuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan terkait Program PKL pada wilayah kerjanya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat perwakilan Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap satuan pendidikan di bawah wilayah binaannya:

1. Kesesuaian konsentrasi keahlian dengan pekerjaan di dunia kerja
2. Durasi pelaksanaan PKL di dunia kerja
3. PKS dengan dunia kerja
4. Keterlaksanaan PKL/Kegiatan pengganti PKL
5. Penanganan kendala atau kasus yang terjadi selama pelaksanaan PKL



BAB VI

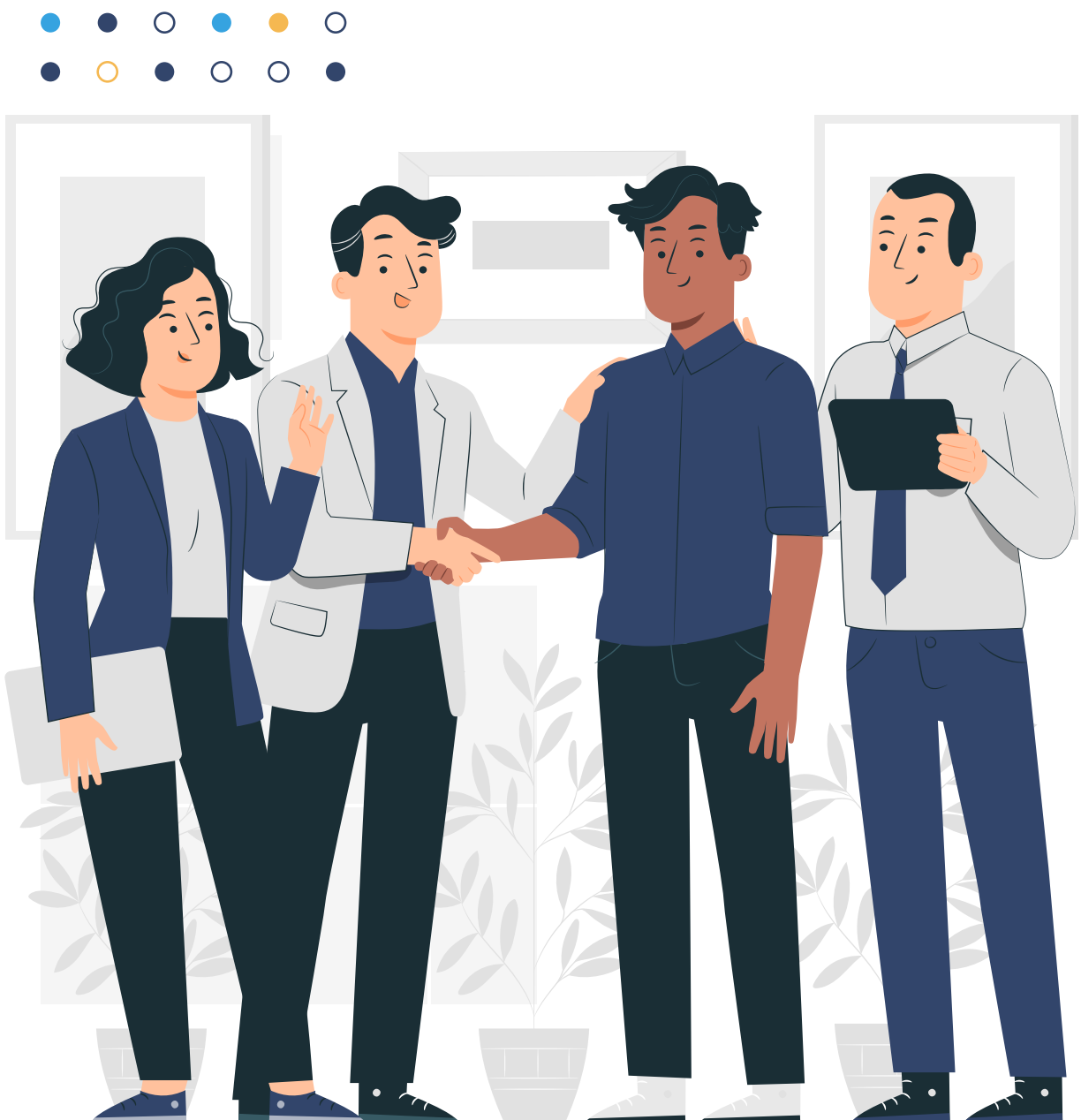
PENUTUP



PKL merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran SMK/MAK yang pada Kurikulum Merdeka merupakan mata pelajaran. Penyusunan Pedoman PKL Sebagai Mata Pelajaran diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran SMK/MAK dan pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan PKL di dunia kerja atau bentuk lain pengganti PKL yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peserta didik, SMK/MAK, dunia kerja, dan masyarakat. Selain itu, panduan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penjaminan mutu di SMK/MAK.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

ANALISIS CP – TP - ATP PKL (DUNIA KERJA)

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
Internalisasi dan Penerapan <i>Soft Skills</i>	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas (antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab), etos kerja, bekerja secara mandiri dan/atau secara tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap norma, K3LH, dan POS yang berlaku di dunia kerja	- menerapkan <i>soft skills</i> yang dibutuhkan dalam dunia kerja (tempat PKL) - menerapkan norma, POS dan K3LH yang ada pada dunia kerja (tempat PKL) - menerapkan kompetensi teknis yang sudah dipelajari di sekolah dan/atau baru dipelajari pada dunia kerja (tempat PKL) - memahami alur bisnis dunia kerja tempat PKL dan wawasan wirausaha	*) ATP disusun sesuai program/kegiatan dunia kerja tempat PKL.
Penerapan <i>Hard Skills</i>	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan sesuai POS yang berlaku di dunia kerja.	*) Kompetensi teknis berupa pekerjaan nyata yang dilaksanakan selama PKL	
Peningkatan dan	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan		






Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
Pengembangan Hard Skills	kompetensi teknis baru/atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari sesuai konsentrasi keahlian		
Penyiapan Kemandirian Berwirausaha	Pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri		



ANALISIS CP – TP - ATP PKL PT. Indonesia Merdeka

Dunia Kerja Tempat PKL : PT. Indonesia Merdeka
 Nama Instruktur Dunia Kerja : Noris
 Nama Guru Mata Pelajaran PKL : Ikhsan
 Konsentrasi Keahlian : Teknik Elektronika Industri
 Pekerjaan Spesifik : Membuat *Power Supply*

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	ATP
Internalisasi dan Penerapan Soft Skills	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas (antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab), etos kerja, bekerja secara mandiri dan/atau dalam tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap norma, K3LH, dan POS yang berlaku di dunia kerja	1.1. Menerapkan etika berkomunikasi 1.2. Menunjukkan integritas (antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab), 1.3. Memiliki etos kerja 1.4. Menunjukkan kemandirian 1.5. Menunjukkan kerjasama 1.6. Menunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan 1.7. Menunjukkan ketaatan terhadap (norma, K3LH, dan POS)	Alur Kegiatan di dunia kerja: 3.1 Menerapkan kompetensi teknis baru pada pembuat rancangan <i>box Power Supply</i> . 3.3 Menerapkan kompetensi teknis baru pada pembuatan rancangan rangkaian <i>Power Supply</i> . 2.1 Menerapkan kompetensi teknis pada pembuatan

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	ATP
Penerapan Hard Skills	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan sesuai POS yang berlaku di dunia kerja.	2.1. Menerapkan kompetensi teknis pada pembuatan <i>Box Power Supply</i> 2.2. Menerapkan kompetensi teknis pada perakitan komponen <i>power supply</i>	<i>Box Power Supply</i> . 3.2 Menerapkan kompetensi teknis baru pada pembuatan rancangan rangkaian <i>Power Supply</i> .
Peningkatan dan Pengembangan Hard Skills	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis baru/atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari sesuai konsentrasi keahlian	3.1. Menerapkan kompetensi teknis baru pada pembuat rancangan box <i>power supply</i> . 3.2. Menerapkan kompetensi teknis baru pada pembuatan rancangan rangkaian <i>power supply</i> 3.3. Menerapkan kompetensi teknis baru pada pembuatan rancangan rangkaian <i>power supply</i> 3.4. Menerapkan kompetensi teknis baru pada perhitungan kebutuhan bahan rangkaian <i>power supply</i>	3.4 Menerapkan kompetensi teknis baru pada perhitungan kebutuhan bahan rangkaian <i>Power Supply</i> . 2.2. Menerapkan kompetensi teknis pada perakitan komponen <i>Power Supply</i> . 3.5 Menerapkan kompetensi teknis baru pada pengiriman barang.

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	ATP
		3.5. Menerapkan kompetensi teknis baru pada pengiriman barang	4.1 Melakukan analisis usaha secara mandiri.
Penyiapan Kemandirian berwirausaha	Pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri	4.1. Melakukan analisis usaha secara mandiri	<i>Catatan:</i> <i>TP pada 1.1 sampai 1.7 dibangun pada semua pekerjaan.</i>

....., 20.....

Guru Mata Pelajaran PKL

Instruktur Dunia Kerja

.....

.....



LAMPIRAN 2

JURNAL KEGIATAN PKL

Nama Peserta Didik : ...
Dunia Kerja Tempat PKL : ...
Nama Instruktur : ...
Nama Guru Mapel PKL : ...

No.	Hari/Tanggal	Unit Kerja/Pekerjaan	Catatan*

Jurnal kegiatan disusun oleh peserta didik sebagai dokumen pekerjaan yang dilaksanakan.

**) Catatan diberikan oleh pembimbing dunia kerja pada setiap kegiatan atau waktu tertentu.*



LAMPIRAN 3

CATATAN KEGIATAN PKL

Nama Peserta Didik : ...
Dunia Kerja Tempat PKL : ...
Nama Instruktur : ...
Nama Guru Mapel PKL : ...

A. Nama Pekerjaan

B. Perencanaan Kegiatan

(Jadwal Kegiatan/dokumen perencanaan)

C. Pelaksanaan Kegiatan/Hasil

(Uraian proses kerja dan foto hasil)

D. Catatan Instruktur

(Catatan Instruktur)

(*Lembar ini dibuat untuk setiap tugas/pekerjaan yang dilaksanakan peserta didik)

Tanda Tangan Instruktur

(.....)

LAMPIRAN 4

LEMBAR OBSERVASI PKL

Nama Peserta Didik : ...
 Dunia Kerja Tempat PKL : ...
 Nama Instruktur : ...
 Nama Guru Mapel PKL : ...
 Pekerjaan/ Proyek : Pembuatan *Power Supply*

No.	Tujuan Pembelajaran/Indikator	Ketercapaian Ya/Tidak	Deskripsi
1	Menerapkan <i>soft skills</i> yang dibutuhkan dalam dunia kerja (tempat PKL)		Peserta didik sudah memiliki <i>soft skill</i> sesuai harapan dalam (sebutkan indikator yang tercapai/Ya) namun masih perlu ditingkatkan dalam hal (sebutkan indikator yang tidak tercapai/Tidak)
	1.1. Melaksanakan komunikasi telepon sesuai kaidah	Ya/Tidak	
	1.2. Menunjukkan integritas (antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab),	Ya/Tidak	
	1.3. Memiliki etos kerja	Ya/Tidak	
	1.4. Menunjukkan kemandirian	Ya/Tidak	
	1.5. Menunjukkan kerjasama	Ya/Tidak	
	1.6. Menunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan	Ya/Tidak	
2	Menerapkan norma, POS dan K3LH yang ada pada dunia kerja (tempat PKL)		
	2.1. Menggunakan APD dengan tertib dan benar	Ya/Tidak	
	2.2. Melaksanakan pekerjaan sesuai POS	Ya/Tidak	
	Skor		



No.	Tujuan Pembelajaran/Indikator	Ketercapaian Ya/Tidak	Deskripsi
3	Menerapkan kompetensi teknis yang sudah dipelajari di sekolah dan/atau baru dipelajari pada dunia kerja (tempat PKL)		Peserta didik mampu menerapkan kompetensi pada pembuatan box <i>power supply</i> dan rangkaiannya, meliputi (sebutkan indikator yang tercapai/Ya) namun masih perlu ditingkatkan pada (sebutkan indikator yang tidak tercapai/Tidak)
	3.1. Membuat box power supply	Ya/Tidak	
	3.1.2. Memotong plat	Ya/Tidak	
	3.1.3. Mengebor plat	Ya/Tidak	
	3.1.4. Menekuk plat	Ya/Tidak	
	3.1.5. Mengecat plat	Ya/Tidak	
	3.1.6. Memeriksa produk	Ya/Tidak	
	3.2. Merakit komponen <i>power supply</i>		
	3.2.1. Membuat PCB	Ya/Tidak	
	3.2.2. Menyolder komponen pada PCB	Ya/Tidak	
	3.2.3. Merakit <i>Power Supply</i>	Ya/Tidak	
	3.2.4. Memeriksa Produk	Ya/Tidak	
	3.3. Membuat rancangan box <i>power supply</i> .		
	3.3.1. Membuat rancangan produk dengan <i>software</i>	Ya/Tidak	
	3.3.2. Menghitung kebutuhan bahan	Ya/Tidak	

No.	Tujuan Pembelajaran/Indikator	Ketercapaian Ya/Tidak	Deskripsi
	3.3.3 Membuat rancangan pekerjaan dengan <i>software</i> .	Ya/Tidak	
	3.3.4 Menghitung kebutuhan bahan rangkaian <i>power supply</i>	Ya/Tidak	
	3.4. Menerapkan kompetensi teknis pengiriman produk		
	3.4.1. Pembuatan faktur	Ya/Tidak	
	3.4.2. Pengecekan pengiriman barang	Ya/Tidak	
	Skor		
4	Memahami alur bisnis dunia kerja tempat PKL dan wawasan wirausaha		Peserta didik telah mampu membekali kemandiriannya dengan menguasai, dan masih perlu bimbingan dalam
	4. 1. Mengidentifikasi kegiatan usaha di tempat kerja	Ya/Tidak	
	4. 2. Menjelaskan rencana usaha yang akan dilaksanakan	Ya/Tidak	
	Skor		

No.	Tujuan Pembelajaran/Indikator	Ketercapaian Ya/Tidak	Deskripsi
	Catatan Guru Mata Pelajaran PKL		
	Catatan Instruktur industri		

Keterangan:

Guru Mapel PKL

....., 20.....
Instruktur Dunia Kerja

.....

.....

LAMPIRAN 5

DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PKL

SMK

Tahun Ajaran .../...

Nama Peserta Didik : ...
 NISN : ...
 Kelas : ...
 Program Keahlian : ...
 Konsentrasi Keahlian : ...
 Tempat PKL : ...
 Tanggal PKL : Mulai: ... Selesai: ...
 Nama Instruktur : ...
 Nama Pembimbing : ...

Tujuan Pembelajaran	Skor	Deskripsi
1. Menerapkan <i>soft skills</i> yang dibutuhkan dalam dunia kerja (tempat PKL)		(Dipindah dari lembar observasi PKL peserta didik)
2. Menerapkan norma, POS dan K3LH yang ada pada dunia kerja (tempat PKL)		
3. Menerapkan kompetensi teknis yang sudah dipelajari di sekolah dan/atau baru dipelajari pada dunia kerja (tempat PKL)		
4. Memahami alur bisnis dunia kerja tempat PKL		



Tujuan Pembelajaran	Skor	Deskripsi
Catatan		

Kehadiran	
Sakit	: Hari
Ijin	: Hari
Tanpa Keterangan	: Hari

Guru Mapel PKL

....., 20.....
Instruktur Dunia Kerja

.....

.....

LAMPIRAN 6

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN ANTARA SMK MERDEKA BELAJAR DENGAN TOKO ABUYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Noris, M.T
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pondok Ungu, No. 70, Kota BEKASI, Jawa Barat
Telepon : 08123456789

dalam hal ini bertindak atas nama **SMK MERDEKA BELAJAR** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Ikhsan Kurnia
Jabatan : Pemilik Toko
Alamat : Jl. Pancing No. 33, Duren Sawit, Jakarta Timur
Telepon : 08144432222

dalam hal ini bertindak atas nama **TOKO ABUYA** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PARA PIHAK** bermufakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- **PIHAK PERTAMA** diperkenankan untuk mengirimkan peserta didiknya guna melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada **PIHAK KEDUA** sesuai kapasitas **PIHAK KEDUA**.
- **PIHAK PERTAMA** merencanakan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bersama **PIHAK KEDUA**.
- Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada **PIHAK KEDUA** adalah paling lama 1 semester atau 16 (enam belas) minggu efektif.
- **PIHAK KEDUA** menyediakan praktik kerja dan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi peserta didik yang ditempatkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai perencanaan Praktik Kerja Lapangan.
- **PIHAK KEDUA** dapat memberikan insentif pada peserta didik yang ditempatkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai kinerjanya.
- **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan secara berkala pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

- **PIHAK KEDUA** atau yang diberi kuasa menandatangani sertifikat keikutsertaan Praktik Kerja Lapangan bagi peserta didik yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan di antara **PARA PIHAK**.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara **PARA PIHAK** untuk mencapai mufakat di kemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara hukum yang berlaku.

Jakarta, 28 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Noris, M.T

Ilkhsan Kurnia

Saksi-saksi:

1.....

2.....

- **Contoh naskah perjanjian kerjasama ini hanya merupakan inspirasi dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada sekolah dan dunia kerja masing-masing.**



LAMPIRAN 7

BENTUK KEWIRAUSAHAAN

A. Kewirausahaan baru

Simulasi - SMK Pariwisata

peserta didik jurusan Tata Boga (sebaiknya dalam kelompok) membuat makanan yang dapat dijual melalui *online*. Mereka mempersiapkan beberapa hal sebelum menjalankan usahanya ini:

1. Survey pasar untuk melihat jenis makanan apa yang diminati oleh masyarakat, bisa lebih dari satu bentuk makanan: makanan utama, roti atau *pastry*, makanan penutup (*dessert*).
2. Membagi tugas siapa yang memasak apa berdasarkan hasil survei pasar.
3. Mencoba membuat makanan sesuai menu dan merancang bentuk penyajiannya sehingga mudah dibungkus dan dikirim melalui kurir.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan Jurusan Akuntansi atau Bisnis Manajemen (sekaligus menjadi PKL bagi mereka). peserta didik jurusan Akuntansi dapat membuat perhitungan cost dan laba rugi serta membuat pembukuan sederhana yang dapat digunakan oleh peserta didik jurusan Tata Boga untuk memastikan bahwa bisnis yang mereka jalankan akan mendapatkan keuntungan.

Kolaborasi dengan peserta didik jurusan Bisnis Manajemen (dapat menjadi PKL juga bagi mereka) adalah pada membuat analisa pasar termasuk juga packaging yang menarik serta *marketing* untuk pemasaran produk melalui cara *online*.

Guru mapel PKL memastikan bahwa semua proses ini dilakukan oleh peserta didik sebelum mereka menjalankan PKL Kewirausahaan.

B. Kewirausahaan yang sudah berjalan

Simulasi - SMK Agribisnis Agroteknologi

peserta didik membuat 'penelitian' kecil untuk melihat dan menghubungi Unit Usaha Pertanian yang ada di sekitar tempat dia tinggal yang memenuhi persyaratan usaha seperti yang tercantum di dokumen ini serta bersedia untuk menerima peserta didik untuk melakukan PKL di unit usaha tersebut.



Peserta didik membicarakan dengan guru mapel PKL untuk melakukan 'review' pada Unit Usaha Pertanian yang sudah diidentifikasi tersebut dan memilih mana yang paling tepat sesuai dengan Konsentrasi Keahlian peserta didik. Dan selanjutnya mengajukan permohonan langsung kepada Unit Usaha Pertanian pilihannya.

Kemungkinan area untuk PKL pada Unit Usaha Pertanian adalah:

1. Proses pengadaan komoditas produk pertanian yang diperdagangkan.
2. *Quality control* pada produk yang akan dijual - standar mutu.
3. *Packaging* produk sesuai peruntukannya.
4. Pemasaran produk.
5. Pembukuan usaha.



LAMPIRAN 8

PERHITUNGAN PEMBAGIAN JAM PELAJARAN GURU MATA PELAJARAN PKL

Pada pembagian Jam Pelajaran (JP) guru mapel PKL, hal yang menjadi prioritas adalah pemenuhan beban kerja guru sesuai dengan sertifikasi guru. Oleh karena itu, pembimbing PKL diutamakan bagi guru yang mata pelajarannya diganti menjadi mapel PKL. Namun juga dapat dipertimbangkan untuk semua pendidik yang dimiliki sekolah. Kebijakan pembagian jumlah peserta didik yang diampu masing-masing guru diserahkan pada manajemen sekolah. Total alokasi JP PKL yang diinput ke Dapodik disesuaikan dengan beban mengajar mata pelajaran yang diampu sebelumnya dengan memperhitungkan jumlah peserta didik yang dibimbing.

Perhitungan JP guru ditentukan menggunakan Indeks 'koefisien' berbasis jumlah seluruh rombel yang melaksanakan PKL di sekolah, bukan masing-masing rombel. Hal tersebut dikarenakan jika berbasis rombel akan terdapat perbedaan nilai indeks 'koefisien' untuk tiap rombel di satu sekolah yang sama. Perumusannya sebagai berikut:

$$\text{Koefisien} = \frac{\text{Jumlah rombel yang akan melaksanakan PKL} \times 46 \text{ JP}}{\text{Jumlah siswa yang akan melaksanakan PKL}}$$

Terdapat dua skema perhitungan JP guru mapel PKL, yaitu perhitungan bagi sekolah dengan jumlah peserta didik yang melebihi jumlah guru mapel PKL dan perhitungan bagi sekolah dengan jumlah peserta didik lebih sedikit dari guru mapel PKL.

Skema I: Perhitungan JP guru bagi sekolah jika jumlah peserta didik yang melebihi jumlah guru mapel PKL maka dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Jumlah JP Guru} = \text{Jumlah siswa yang diampu} \times \text{Koefisien}$$

Ilustrasi I.a: SMK Merdeka Belajar memiliki 6 rombel pada kelas XII, namun pada semester ini hanya 3 rombel yang akan melaksanakan PKL karena keterbatasan dunia kerja yang dapat menampung peserta PKL. Pada 3 rombel tersebut terdapat sebanyak 108 siswa (masing-masing 36 siswa tiap rombel). Pak Budi merupakan guru Bahasa Indonesia, beliau diminta untuk membimbing 5 orang peserta PKL di perusahaan XYZ. Berikut perhitungan JP nya:

$$\begin{aligned} \text{Koefisien} &= \frac{3 \text{ rombel} \times 46 \text{ JP}}{108 \text{ siswa}} \\ &= 1,27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah JP Pak Budi} &= 5 \text{ orang} \times 1,27 \\ &= 6,35 \sim 6 \text{ JP} \end{aligned}$$

Ilustrasi I.b: SMK Merdeka Belajar memiliki 6 rombel pada kelas XII, pada semester ini seluruh rombel akan melaksanakan PKL. Pada setiap rombel terdapat 36 siswa sehingga total peserta didik yang akan melaksanakan PKL pada semester ini sebanyak 216 siswa. Pada semester ini, Pak Budi sebagai guru Akuntansi kehilangan 8 JP akibat pelaksanaan mata pelajaran PKL. Oleh karena itu, kepala sekolah meminta Pak Budi untuk menjadi guru mata pelajaran PKL pada semester ini. Untuk mengganti 8 JP yang hilang, maka Pak Budi perlu membimbing berapa siswa?

$$\begin{aligned} \text{Koefisien} &= \frac{6 \text{ rombel} \times 46 \text{ JP}}{216} \\ &= \frac{276}{216} = 1,27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah siswa yang diampu} &= \frac{\text{Jumlah JP guru}}{\text{Koefisien}} \\ &= \frac{8}{1,27} = 6,2 \sim 6 \text{ siswa} \end{aligned}$$



Skema II: Perhitungan JP guru bagi sekolah jika jumlah peserta didik lebih sedikit dari guru mapel PKL maka dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Jumlah JP Guru} = \frac{\text{Koefisien}}{\text{Jumlah guru pembimbing}}$$

Ilustrasi: SMK Merdeka terletak di daerah terpencil. Pada kelas XII hanya terdapat satu rombel berisi 10 peserta didik. Seluruh peserta didik akan melaksanakan PKL pada semester ini. Namun terdapat 12 guru yang akan kehilangan jam mengajarnya akibat adanya pelaksanaan PKL di semester ini sehingga ada beberapa peserta didik yang dibimbing oleh dua guru. Berikut perhitungan JP masing-masing guru apabila 1 peserta didik dibimbing oleh 2 guru:

$$\begin{aligned} \text{Koefisien} &= \frac{1 \text{ rombel} \times 46 \text{ JP}}{10 \text{ siswa}} \\ &= 4,6 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Apabila jumlah guru 12 orang dan jumlah siswa 10 orang, ada 8 orang siswa yang dibimbing oleh satu orang guru dan ada 2 orang siswa yang dibimbing masing-masing oleh dua orang guru sehingga pembagian JP untuk guru sebagai berikut:

Untuk 1 siswa dengan 1 orang guru pembimbing

Jumlah JP masing-masing guru = koefisien / jumlah guru pembimbing
 $= 4,6 / 1 = 4,6 \text{ JP}$ atau setara 5 JP

Untuk 1 siswa dengan 2 orang guru pembimbing

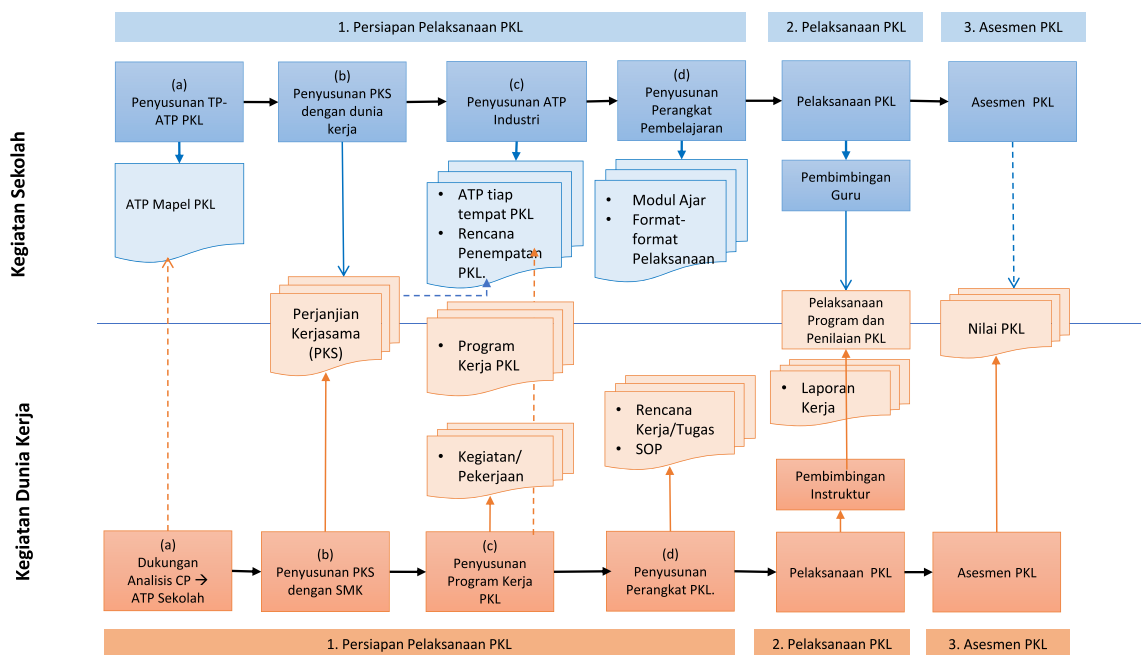
Jumlah JP masing-masing guru = koefisien / jumlah guru pembimbing
 $= 4,6 / 2 = 2,3 \text{ JP}$ atau setara 2 JP



LAMPIRAN 9

RINGKASAN PELAKSANAAN PKL UNTUK DUNIA KERJA

ALUR PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



Gambar 9.1 Alur Kegiatan PKL untuk Sekolah dan Dunia Kerja

Secara rinci kegiatan sekolah dan dunia kerja dalam pelaksanaan PKL dapat dijelaskan pada **Gambar 9.1**.



Tabel 9.1 Kegiatan Sekolah dan dan dunia kerja dalam pelaksanaan PKL

Kegiatan Sekolah	Kegiatan Dunia Kerja
1. Perencanaan Pembelajaran PKL a. Penyusunan TP-ATP mata Pelajaran PKL. Sebagai mata pelajaran, PKL dalam implementasi kurikulum merdeka harus menganalisis Capaian Pembelajaran, serta menyusun tujuan pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Perumusan TP dan penyusunan ATP sebaiknya memerhatikan kegiatan di semua tempat PKL (dunia kerja). ATP mapel PKL sebagai kerangka bersama pelaksanaan PKL pada semua dunia kerja. Oleh karena itu penyusunannya diharapkan melibatkan banyak dunia kerja, setidaknya informasi kegiatan/kompetensi yang dapat dan atau akan dilaksanakan.	1. Perencanaan Pembelajaran PKL a. Dukungan penyusunan TP-ATP Mapel PKL. Dunia kerja dapat berpartisipasi dalam menganalisis Capaian Pembelajaran (CP), serta menyusun Tujuan Pembelajaran (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) dan alur tahapan pencapaiannya dalam bentuk Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Mapel PKL. Apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dunia kerja dapat menyampaikan usulan. Hasil penyusunan TP-ATP akan menjadi landasan penyusunan program dan pelaksanaan PKL di dunia kerja.
b. Penyusunan PKS dengan dunia kerja. Berdasarkan TP-ATP mapel PKL manajemen sekolah mengidentifikasi dunia kerja yang dapat melaksanakan PKL sesuai dengan konsentrasi keahlian. Data tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan penajakan kerjasama. Apabila sepakat dapat dilanjutkan dengan penyusunan PKS.	b. Penyusunan PKS dengan Sekolah. Berdasarkan permintaan dan/atau inisiasi dunia kerja dapat melaksanakan PKS dalam pelaksanaan PKL. PKS disusun berdasar analisis kesesuaian Tujuan Pembelajaran yang ditetapkan dan potensi pekerjaan yang dapat dilaksanakan di dunia kerja.
c. Penyusunan ATP Dunia Kerja. Berdasarkan TP-ATP mapel PKL, sekolah bersama dunia kerja menyusun TP-ATP di masing-masing tempat PKL berdasarkan PKS. Dokumen ini diperlukan karena kegiatan masing-masing dunia kerja berbeda-beda.	c. Penyusunan Program Kerja PKL. Berdasarkan PKS yang telah disusun, dunia kerja menyusun rencana kerja/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik selama melaksanakan PKL.
d. Penyusunan perangkat pembelajaran. Berdasar kesepakatan dengan dunia kerja sekolah menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat tersebut meliputi: modul ajar dan jurnal pelaksanaan PKL. Perangkat	d. Penyusunan Perangkat Berdasar kesepakatan dengan sekolah menyusun perangkat kegiatan yang meliputi: informasi teknis, langkah kerja (POS), instrumen asesmen/penilaian, dan

pembelajaran disesuaikan dengan tempat PKL.	dokumen lainnya yang dibutuhkan selama PKL di dunia kerja.
2. Pelaksanaan PKL Pembimbingan PKL oleh guru mapel PKL yang dilakukan dengan intens dan berkala. Kegiatan dilakukan secara daring dan/atau luring. Pemantauan meliputi: kesesuaian kompetensi peserta didik dengan pekerjaan, pelaksanaan program, pelaksanaan bimbingan oleh instruktur, keselamatan dan keamanan peserta didik.	2. Pelaksanaan PKL Memberikan tugas/pekerjaan kepada peserta didik sesuai konsentrasi keahlian/jurusan. Dunia kerja juga menetapkan pembimbing PKL /instruktur. Pelaksanaan PKL perlu memerhatikan jam kerja sesuai dengan usia sekolah, serta menjamin keselamatan dan keamanan peserta didik di dunia kerja.
3. Asesmen PKL Kegiatan Asesmen meliputi asesmen awal, proses dan akhir yang dilaksanakan bersama instruktur dunia kerja.	3. Asesmen PKL Melaksanakan asesmen awal, proses, dan akhir sesuai karakter dunia kerja, serta memberikan Surat Keterangan telah melaksanakan PKL kepada peserta didik.





DirektoratSMK



DirektoratSMK



DirektoratSMK



DirektoratSMK



Direktorat SMK - Kemdikbud



<https://smk.kemdikbud.go.id/>